

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Teori

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset utama di dalam organisasi. Laporan keuangan merupakan informasi yang dihasilkan berdasarkan bidang disiplin ilmu akuntansi, sehingga dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan SDM yang berkompeten. SDM adalah penyusun, pelaksana, dan pengevaluasi jalannya suatu tatanan dalam mencapai tujuan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan akuntansi keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi SDM sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan pemahaman SDM terhadap akuntansi. Pemahaman akuntansi antara lain terhadap prinsip pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian suatu transaksi keuangan. Menurut Yuliani (2010) dikatakan bahwa:

....dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun yang menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia menurut Hutapea (2008:28) yaitu:

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi:

- 1) Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja

- a) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, tehnik yang baru dalam perusahaan.
 - b) Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan taktik yang tepat dan benar.
- 2) Keterampilan individu meliputi:
 - a) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
 - b) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.
- 3) Sikap kerja
 - a) Memiliki kemampuan dalam berkreaitivitas dalam bekerja.
 - b) Adanya semangat kerja yang tinggi.
 - c) Memiliki kemampuan dalam perencanaan/pengorganisasian.

Ada beberapa penelitian yang menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian Nurillah (2014) menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan Arsyati (dalam Evicahyani, 2015:21) menemukan bukti empiris dan menyimpulkan bahwa pengaruh SDM dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan dilihat koefisien jalur mempunyai arah yang positif yang artinya SDM mempunyai pengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan.

2. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah agar terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Daerah harus lebih optimal

dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terintegrasi.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dapat berupa sistem akuntansi manual maupun berbasis komputer. Jika Pemerintah Daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer dengan tujuan untuk menghemat waktu dan tenaga, informasi yang dihasilkan juga lebih tepat waktu, lebih bervariasi dan lebih berkualitas, bahkan dengan perangkat lunak akuntansi laporan keuangan yang dihasilkan akan jauh lebih berkualitas dan bisa dilengkapi dengan analisis laporan keuangan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan semakin mudah dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju karena memiliki kekuatan atau potensi dalam hal ketepatan, konsistensi, ketepatan kehandalan dan kemampuan menyimpan data yang besar. Namun, penggunaan teknologi informasi membutuhkan dana yang cukup mahal. Pengaruh Sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibuktikan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penggunaan basis akuntansi tersebut sering disebut dengan basis Kas Menuju Akrual.

Dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku. PP Nomor

71 Tahun 2010 telah mengakomodasi SAP berbasis akrual. Pelaksanaan SAP berbasis akrual secara penuh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan pada pelaporan keuangan TA 2015.

Penerapan SAP terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan standar akuntansi yang berlaku dan menghindari masalah yang bisa menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan akan lebih berkualitas dan laporan keuangan yang dihasilkan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan serta agar terdapat konsistensi dalam laporan keuangan hingga dapat dilakukan perbandingan/memiliki daya banding (*comparability*).

Pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD dibuktikan dengan teori Mardiasmo (2006) yang menyatakan bahwa Kualitas LKPD dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan teori Bastian (2005) menyimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dan upaya dalam meningkatkan kualitas laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia. Begitu juga teori yang dikemukakan oleh Nugraheni (2008) bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Implementasi SAP pada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mana menurut Evicahyani (2015) bahwa:

Implementasi SAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendukung operasi rutin harian, meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas keuangan dan melindungi aset Pemerintah Daerah. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan diharapkan akan lebih berkualitas dan dapat dijadikan perbandingan kinerja antar periode waktu dan dengan Pemerintah daerah lainnya, serta bagi auditor dengan adanya SAP akan mempermudah proses audit karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen dikaitkan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

4. Peran Audit Internal

Peran auditor internal telah mengalami pergeseran yaitu yang dulunya terkesan sebagai *watchdog*, namun sekarang adanya perubahan peran dan fungsi auditor internal.

Zamzami (2015:4) menguraikan terkait perkembangan audit internal, bahwa:

Fungsi audit internal telah mengalami perubahan penting pada akhir abad ini. Sasaran penting fungsi audit internal berfokus pada pencegahan dan pendeteksian adanya *fraud* untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan penilaian risiko (*risk assessment*). Perubahan penting tersebut merupakan salah satu dampak diterapkannya Sarbane Oxley (SoX) di Amerika yang memberi pengaruh ke seluruh dunia.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit internal merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen yang di desain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi. Menurut Yuliani (2010) kegiatan *assurance* dan konsultasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan lingkup penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi). Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Yuliani (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian lain oleh Prasetyo (2012) yang menyatakan bahwa dampak reuiu inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2010 dan TA 2011 belum dapat meningkatkan opini BPK RI.

5. Karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengertian karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:

.... ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami.

Informasi yang relevan yaitu informasi yang memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan bagi pengguna informasi dari laporan keuangan. Informasi yang andal dalam laporan keuangan adalah informasi yang bebas dari kesalahan material,

menyajikan fakta, dan dapat diverifikasi. Informasi dapat dibandingkan, yaitu ketika informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode atau dibandingkan dengan entitas lain yang sejenis. Terakhir, informasi dapat dipahami, yaitu ketika laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan.

6. Persepsi auditor.

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) dalam Sari (2011:4) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Robin (1996) dalam Sari dkk (2011:4) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang digunakan individu-individu untuk mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka supaya memberi makna terhadap lingkungannya.

Teori ini termasuk dalam teori psikologis perilaku, bahwa persepsi merupakan faktor psikologis yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi seseorang tentang suatu objek, kejadian atau informasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Mahmud, 1990:45).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, persepsi merupakan pandangan yang berasal dari dalam diri individu terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor dari eksternal. Hal ini secara tidak langsung, persepsi seseorang akan mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil seseorang.

Persepsi dalam penelitian ini diasumsikan sebagai pengamatan dan penilaian auditor terhadap suatu hal. Hal yang diamati atau dinilai adalah variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

7. Opini laporan keuangan.

Menurut penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004, opini adalah: pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a) kesesuaian dengan SAP; b) Kecukupan pengungkapan; c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Jenis-jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa menurut penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 adalah opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed*

opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Adapun penjelasan dari masing-masing opini tersebut adalah:

a. Wajar tanpa pengecualian (WTP/*unqualified opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini wajar tanpa pengecualian mengindikasikan bahwa informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

b. Wajar dengan pengecualian (WDP/*qualified opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan yang dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini tersebut, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan kewajaran penyajian dan pengungkapannya dalam opini pemeriksa dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

c. Tidak wajar (TW/*adverse opinion*)

Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak memiliki kehandalan untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

d. Menolak memberikan pendapat atau tidak menyatakan pendapat (TMP/*disclaimer* atau *no opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidaknya dalam semua hal yang material dikarenakan laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga tidak memiliki kehandalan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai upaya suatu variabel independen penelitian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah telah banyak dilakukan. Terdapat juga beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan parsial beberapa variabel independen dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Evicahyani (2015) dengan judul penelitian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan penelitian tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Penelitian lain oleh Mahaputra (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Variabel yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan penelitian tersebut adalah kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD,

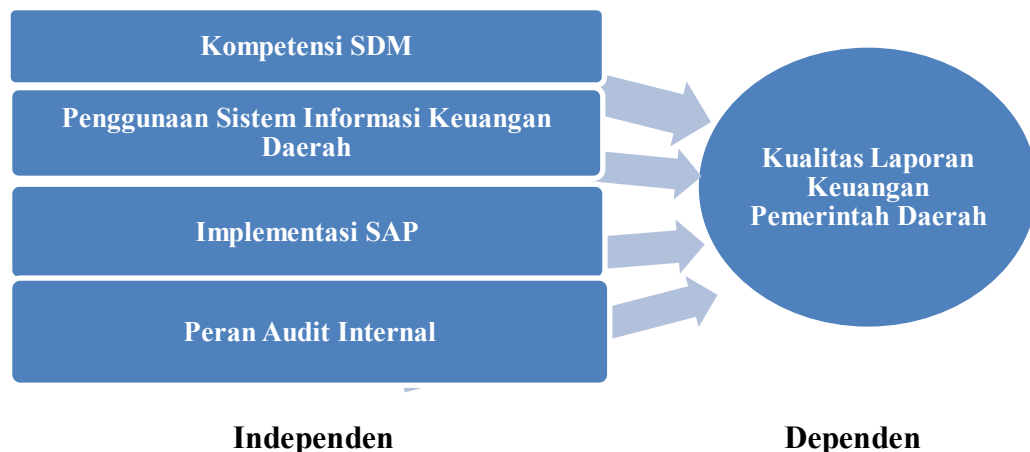
pemanfaatan teknologi informasi, dan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan penelitian tersebut adalah kompetensi SDM.

- d. Penelitian lain yang dilakukan Yuliani (2010) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan (SIKAD) dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. Variabel yang digunakan dalam skripsi ini adalah peran internal audit.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti Gambar I. Penyusunan laporan keuangan dalam hal ini LKPD didukung dengan beberapa upaya yaitu kompetensi sumber daya manusia, penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan peran audit internal.

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran



Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penilaian atas kualitas laporan keuangan, dilakukan oleh BPK. BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran atas informasi laporan keuangan yang disajikan. Dari sudut pandang pemeriksa,

diharapkan BPK dapat memberikan pendapat atas upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh *auditee*. Hal ini dapat membantu *auditee* untuk melakukan peningkatan kualitas laporan keuangan secara efektif

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan paparan landasan teori, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 = Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2 = Penggunaan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_3 = Implementasi SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_4 = Peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_5 = Kompetensi SDM, penggunaan sistem informasi keuangan daerah, implementasi SAP, dan peran audit internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.